

ANALISIS PENERAPAN PSAP NO. 1 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PADA UPTD PUSKESMAS GUNUNG PATI SEMARANG

Tasya Rifanis Shovia, Siti Mutmainah, Nikmatuniyah
Politeknik Negeri Semarang, Jl Prof Soedharto, SH Tembalang Semarang
tasyarifanisshovia@gmail.com, nikmatuniyah@rocketmail.com

Abstract: *Regional Technical Implementation Unit (RTIU) Gunung Pati Public Health Center is a Regional Public Service Agency for the City of Semarang which has the obligation to compile financial reports to meet the demands of transparency and accountability to society. The drafting is using a computer-based application, namely e-BLUD. This application was still incomplete while the operation, which can cause errors in the process of drafting the financial reports. The purpose of this study is to analyze the suitability of the financial reports of the RTIU Gunung Pati Public Health Center with Government Regulation No. 71. The data is used qualitative, quantitative, primary and secondary data. The data collection used interview method, literacy and documentary. The results of this research show that the financial statements of the RTIU Gunung Pati Public Health Center are relatively accordance with Government Regulation no. 71 concerning Government Accounting Standards.*

Keywords: *Application, Presentation, Financial Statements, Government Accounting Standards.*

Abstrak: UPTD Puskesmas Gunung Pati merupakan Badan Layanan Umum Daerah Kota Semarang yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat. Penyusunannya menggunakan aplikasi berbasis komputer yaitu e-BLUD. Aplikasi tersebut masih belum sempurna dalam pengoperasiannya, sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian laporan keuangan UPTD Puskesmas Gunung Pati dengan Peraturan Pemerintah No. 71. Data yang digunakan yaitu, data kualitatif, data kuantitatif, data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi pustaka dan dokumenter. Hasil pembahasan menunjukkan, bahwa laporan keuangan UPTD Puskesmas Gunung Pati relatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kata Kunci: Penerapan, Penyajian, Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan

PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai tujuan utama memberikan jasa dan pelayanan kepada masyarakat, dan berkewajiban untuk terus mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Lembaga pemerintahan memerlukan beberapa penyokong untuk mendukung berjalannya kewajiban tersebut. Salah satu bentuk tata pemerintahan yang baik, yaitu pemerintah memerlukan laporan akuntansi sebagai dasar analisis maupun dalam meningkatkan mutu pengawasan dan pengelolaan keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan tersebut adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan. Peraturan pemerintah tersebut mengatur mengenai pemberlakuan akuntansi berbasis akrual yang menjadi panduan pemerintahan dalam menyusun kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan perubahan sistem pelaporan keuangan yaitu perubahan dari kas basis menuju akrual basis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan SAP Berbasis Kas menuju Akrual.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan, bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) unit pelaksana teknis dinas (UPTD) kesehatan daerah yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu. Sebagai salah satu badan layanan umum daerah Kota Semarang, Puskesmas Gunung Pati diwajibkan melakukan pelaporan keuangan atas pendapatan dan belanja pada kegiatan operasional.

Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, UPTD Puskesmas Gunung Pati memperoleh Alokasi Dana Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, sebagai UPTD Puskesmas daerah Kota Semarang wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran yang diperolehnya berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.

Sistem akuntansi pemerintahan UPTD Puskesmas disajikan dan disusun berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2019 tentang

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang. Dalam penyusunan laporan keuangan pihak Puskesmas menggunakan pedoman yang disusun dalam PMK No. 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruai Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Laporan keuangan yang disusun tiap bulannya masih menggunakan cara manual dengan mencatat pendapatan dan belanja yang dilakukan setiap harinya. Untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan baik bulanan maupun tahunan, Puskesmas Gunung Pati menggunakan aplikasi yaitu E-BLUD. E-BLUD adalah software pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mampu menangani proses pengelolaan keuangan BLUD mulai dari penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA) sampai dengan Pelaporan Keuangan berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Namun, aplikasi ini masih belum sempurna dalam pengaplikasiannya dan masih dalam tahap perbaikan dan penyempurnaan, sehingga hal ini dapat menyebabkan tertundanya penyusunan laporan keuangan. Kemungkinan lainnya, yaitu dapat menimbulkan kesalahan pencatatan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Kesalahan dalam pencatatan menyebabkan kesalahan dalam menyusun laporan keuangan. Hasil yang diperoleh dapat tidak sesuai dengan anggaran dan atau belanja yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui kelengkapan komponen laporan keuangan pada laporan keuangan UPTD Puskesmas Gunung Pati.
- 2) Untuk melakukan identifikasi kesesuaian unsur-unsur Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Gunung Pati terhadap Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintahan No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan ini meliputi: klasifikasi data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data dan metode penulisan.

Klasifikasi Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu data menurut sifatnya dan data menurut sumbernya.

- a. Data Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini yaitu:

 1. Data Kualitatif

Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi gambaran umum, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang karyawan dan kebijakan prosedur yang diterapkan oleh UPTD Puskesmas Gunung Pati.
 2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- b. Data Menurut Sumbernya

Jenis data menurut sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini tidak menggunakan data primer dan hanya menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh berupa dokumen profil UPTD Puskesmas Gunung Pati, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data, serta menguji data dari informasi yang telah dikumpulkan.

Metode pengumpulan data yang diperlukan untuk memperoleh data yang akurat berupa:

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada bagian administrasi dan tata usaha UPTD Puskesmas Gunung Pati mengenai penerapan kebijakan akuntansi pada laporan keuangan yang disusun berdasarkan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Informasi yang diperoleh bertujuan untuk untuk mendapatkan pemahaman penyusunan laporan keuangan pada UPTD Puskesmas.

2. Studi Dokumenter

Studi pustaka dilakukan dengan membaca dan memahami dokumen-dokumen seperti buku, catatan dan bentuk dokumen lainnya. Dalam penelitian ini studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi yang mendukung penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu yang mendasari tentang penyajian laporan keuangan pemerintahan. Studi Pustaka

3. Dokumenter

Dokumen yang diperoleh berupa profil UPTD Puskesmas Gunung Pati, laporan keuangan tahun 2018 dan laporan keuangan tahun 2019.

Metode Pengolahan Data

Berikut cara pengolahan data yang akan dilakukan:

1. Membandingkan komponen-komponen yang terdapat di dalam laporan keuangan UPTD Puskesmas Gunung Pati dengan PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan;
2. Menganalisis kesesuaian akuntansi di dalam tiap komponen yang ada di laporan keuangan UPTD Puskesmas Gunung Pati dengan

PSAP No. 1 tentang penyajian laporan keuangan.

Metode Penulisan Data

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Metode Deskriptif

Metode ini digunakan dalam menguraikan gambaran umum tentang UPTD Puskesmas Gunung Pati yang berisi profil singkat dari UPTD Puskesmas Gunung Pati, struktur organisasi, visi dan misi, dan uraian tugas pada setiap bagian pada UPTD Puskesmas Gunung Pati.

2. Metode Eksplanasi

Metode ini digunakan untuk menjelaskan teori tentang laporan keuangan, melakukan analisis kesesuaian laporan keuangan terhadap PSAP No .1 tentang penyajian laporan keuangan pemerintahan dan menyajikan hasil identifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Puskesmas Gunung Pati mempunyai peran sebagai puskesmas induk yang memiliki jangkauan 16 kelurahan dengan 11 kelurahan binaan. Berikut merupakan 11 kelurahan binaan Puskesmas Gunung Pati, yaitu Kelurahan Gunung Pati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Pakintelan, Kelurahan Nongkosawit, Kelurahan Cepoko, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Sumurejo, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Pongangan, Kelurahan Kandri, dan Kelurahan Sadeng.

Visi, Misi dan Motto UPTD Puskesmas Gunung Pati

Puskesmas sebagai badan layanan umum daerah mempunyai visi dan misi guna tercapainya tujuan yang telah disusun. Berikut visi, misi dan motto Puskesmas Gunung Pati:

1. Visi
Menjadi puskesmas pilihan dan mitra terbaik masyarakat menuju Kecamatan Gunung Pati Sehat.
2. Misi
Untuk mencapai visi yang telah ditentukan, UPTD Puskesmas Gunung Pati memiliki misi sebagai berikut:
 - 1.) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
 - 2.) Mendorong kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
3. Motto
UPTD Puskesmas Gunung Pati mempunyai motto "Pelayanan Prima untuk Semua".

Tugas dan Wewenang Puskesmas

Puskesmas wajib melaksanakan tugas dan wewenang Puskesmas yang telah diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Berikut merupakan tugas dan wewenang Puskesmas:

1. Tugas
Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya Kecamatan Sehat.
2. Wewenang
Wewenang Puskesmas dibagi menjadi dua berdasarkan fungsi penyelenggaraannya, yaitu fungsi penyelenggaraan UKM dan fungsi penyelenggaraan UKP. Berikut merupakan wewenang atas fungsi penyelenggaraan UKM:
 - a) Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang

diperlukan, b) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, c) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, d) Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait, e) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, f) Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas, g) Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan, h) Memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual, i) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan, j) Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit, k) Melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga, l) Melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Berikut merupakan wewenang-wewengannya, yaitu:

- a) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor

biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter - pasien yang erat dan setara, b) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif, c) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat d) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja, e) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi, f) Melaksanakan penyelenggaraan rekam medis, g) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan, h) Melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas, i) Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan, j) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Gunung Pati

UPTD Puskesmas Gunung Pati merupakan Badan Layanan Umum Masyarakat Daerah (BLUD), sehingga pelaksanaan kegiatannya menganut sistem sesuai peraturan yang berlaku untuk BLU/BLUD. Berikut merupakan struktur organisasi BLUD UPTD Puskesmas Gunung Pati:

1. Direktur BLUD;
2. Manajer Pelayanan, membawahi:
 - a. Divisi UKP;
 - b. Divisi UKM Esensial;
 - c. Divisi UKM Pengembangan;
 - d. Divisi Jaringan dan Jejaring.
3. Manajer Keuangan, membawahi:
 - a. Divisi Umum;
 - b. Divisi Keuangan.

Komponen-Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada UPTD Puskesmas Gunung Pati Semarang

UPTD Puskesmas Gunung Pati menyusun dan menyajikan laporan keuangan menganut pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan keuangan ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan yang disusun, mempunyai kebijakannya masing-masing. Berikut merupakan kebijakan-kebijakan yang digunakan UPTD Puskesmas Gunung Pati:

1. Pendapatan-LRA
 - a) Pendapatan BLU yang dikelola sendiri dan tidak disetor ke Kas Negara/Daerah merupakan pendapatan negara/daerah, b) Pendapatan-LRA pada BLU diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLU diakui sebagai pendapatan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, c) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), d) Pendapatan-LRA pada BLU diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak BLU yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Berikut merupakan kebijakan yang digunakan: a) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, b) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), c) Pendapatan-LO pada BLU merupakan pendapatan bukan pajak.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Berikut merupakan kebijakan yang digunakan: a) Belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, b) Belanja pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi, c) Klasifikasi ekonomi untuk BLU, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

4. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Berikut merupakan kebijakan yang digunakan: a) Beban pada BLU diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, b) Beban pada BLU diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, c) Klasifikasi ekonomi untuk BLU yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

5. Aset

Aset memiliki beberapa klasifikasi di dalamnya, yaitu aset lancar, aset tetap dan aset lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara disajikan dengan menggunakan nilai nominal, Kas pada BLU yang sudah dipertanggungjawabkan kepada unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih, Dana kas BLU yang bukan milik BLU diakui sebagai kas dan setara kas, yang berasal dari sisa dana investasi APBN/ APBD diakui sebagai aset lainnya, Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLU pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLU penambah ekuitas pada Pemerintah Pusat/Daerah.

- Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*) dan dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga transaksi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

- Piutang dari Kegiatan BLU
Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andal dan dicatat sebesar nilai nominal.
 - Persediaan
Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir;
6. Investasi Jangka Panjang
BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur/ Bupati/ Walikota.
 7. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Berikut merupakan pengakuan aset tetap:
 - a) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, b) Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang – undangan di bidang BMN/BMD.
 8. Penyusutan Aset Tetap
Penyusunan aset tetap adalah terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan. Berikut merupakan pengakuan penyusutan aset tetap: a) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian, b) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan, c) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu, d) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 9. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan.
 10. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah dana kelolaan, aset yang dibatasi penggunaannya, aset tak berwujud dan aset kerjasama (kemitraan).
 11. Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu:
 - Kewajiban Jangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dari kewajiban jangka

pendek, yaitu utang usaha, utang pihak ketiga, utang pajak, utang kepada KUN, belanja yang masih harus dibayar, pendapatan diterima dimuka dan utang jangka pendek lainnya.

- **Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

12. **Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

13. **Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Keuangan**

Pemerintah merancang Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjelaskan, bahwa semua instansi pemerintahan wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Hal ini mulai diwajibkan penggunaannya dari tahun 2015 yang sebelumnya menggunakan basis kas menuju akrual. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan UPTD Puskesmas memulai pelaporan keuangan pada tahun 2018, sehingga langsung menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Penyajian Laporan Keuangan pada UPTD Puskesmas Gunung Pati

Berikut merupakan penjelasan atas penyajian laporan keuangan pada UPTD Puskesmas Gunung Pati:

1. **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Pendapatan-LRA pada tahun 2019 sebesar

Rp 2.598.988.600 atau mencapai 91,23% dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.848.680.401. Belanja pada tahun 2019 adalah sebesar Rp 2.635.165.512 atau mencapai 92,50 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 2.848.680.401.

2. **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih pada 1 Januari 2019 sebesar Rp 294.906.401 dan terdapat pengurangan berupa Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp 36.176.912, sehingga Saldo Anggaran Lebih pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 258.729.489.

3. **Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 8.205.996.859 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 594.075.777 Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 7.611.921.082. Nilai Kewajiban sebesar 8.564.103 dan nilai Ekuitas sebesar Rp. 8.197.432.756.

4. **Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 7.625.518.862, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp. 7.592.130.651 dan beban non-operasional sebesar Rp 4.733.397, sehingga menghasilkan surplus-LO sebesar Rp 28.654.814.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU. Laporan ini memuat aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Pada 31 Desember 2019 disajikan laporan arus kas, saldo pada 1 Januari 2019 sebesar Rp 294.906.401 dengan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp 274.130.628, arus kas dari aktivitas investasi minus sebesar Rp 277.620.965, dan arus kas dari aktivitas pendanaan minus sebesar Rp 32.176.912, sehingga menghasilkan penurunan dalam kas dan setara kas sebesar Rp 36.176.912. Saldo kas pada 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp 258.729.489.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan ataupun penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 8.148.760.108 ditambah surplus-LO sebesar Rp.28.654.814. Kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 18.617.834 dan ditambah lain-lain sebesar Rp. 1.400.000 sehingga Ekuitas pada

tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp. 8.197.432.756.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Analisis Terhadap Perbandingan Unsur-Unsur Laporan Keuangan yang di Tetapkan PSAP dengan Unsur-Unsur Laporan Keuangan pada UPTD Puskesmas Gunung Pati Semarang

Laporan Keuangan UPTD Puskesmas Gunung Pati dianalisis kesesuaian unsur-unsurnya pada setiap laporannya. Unsur-unsur yang terdapat pada laporan keuangan UPTD Puskesmas Gunung Pati dijabarkan dan dibandingkan dengan unsur-unsur yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tabel 1. Rekapitulasi Analisis Laporan Keuangan UPTD Puskesmas dengan PP Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan	Menurut PP No. 71 Tahun 2010	Penerapan di UPTD Puskesmas Gunung Pati	Hasil Analisis / Keterangan
Laporan Realisasi Anggaran	LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur sebagai berikut: - Pendapatan-LRA; - Belanja; - Transfer; - Pembiayaan; - Sisa Lebih/ Kurang	LRA disajikan dengan unsur-unsur sebagai berikut: - Pendapatan-LRA; - Belanja; - Pembiayaan; - Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan	Belum sesuai, karena LRA yang disusun tidak terdapat transfer. Pengelolaan pendanaan UPTD digunakan secara langsung sebagai pembelanjaan/ pembiayaan dan tidak

	Pembiayaan Anggaran	Anggaran	menerima pendapatan dari entitas lain.
Laporan Perubahan SAL	Laporan Perubahan SAL sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos berikut: <ul style="list-style-type: none"> - SAL awal; - Penggunaan SAL; - SILPA/SILKA; - Koreksi Kesalahan; - Lain-lain; - SAL akhir. 	Laporan Perubahan SAL disajikan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - SAL awal; - Penggunaan SAL; - SILPA/SILKA; - Koreksi Kesalahan; - Lain-lain; - SAL akhir. 	Sudah sesuai, Laporan Perubahan SAL telah menyajikan informasi Saldo Anggaran Lebih yang telah dibandingkan antara tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya dan telah disusun sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010
Neraca	Neraca mencantumkan pos-pos berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Aset lancar <ul style="list-style-type: none"> • Kas dan Setara Kas; • Investasi Jangka Pendek; • Piutang pajak dan bukan pajak; • Persediaan. - Aset Nonlancar <ul style="list-style-type: none"> • Investasi Jangka Panjang; • Aset Tetap; • Dana Cadangan; • Aset Lainnya. - Kewajiban <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban Jangka Pendek; • Kewajiban Jangka Panjang. - Ekuitas 	Neraca dicantumkan pos-pos sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Aset lancar <ul style="list-style-type: none"> • Kas dan Setara Kas; • Piutang dari Kegiatan Operasional; • Persediaan BLU. - Aset Nonlancar <ul style="list-style-type: none"> • Aset Tetap - Kewajiban <ul style="list-style-type: none"> • Biaya yang Masih Harus Dibayar - Ekuitas 	Belum sesuai, karena terdapat beberapa kekurangan seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Hanya menyajikan piutang jangka pendek. - Tidak terdapat investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, karena BLU/BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur/ Bupati/ Walikota. - Aset Tetap yang disajikan tidak dituliskan secara rinci atas asset tetap yang dimilikinya. - Kewajiban yang disajikan hanya kewajiban jangka pendek, didalam CaLK disebutkan hanya terdapat uraian dari kewajiban jangka pendek yaitu Biaya yang Masih Harus Dibayar beserta dengan rinciannya.
Laporan Operasional	LO menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan-LO; - Beban; - Transfer; - Pos Luar Biasa, bila ada; - Surplus/ Defisit-LO. 	LO disajikan dengan pos-pos sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan-LO; - Beban; - Beban Non Operasional - Surplus/ Defisit-LO 	Belum sesuai, karena LO yang disusun UPTD Puskesmas Gunung Pati tidak terdapat transfer. Pengelolaan pendanaan UPTD digunakan secara langsung dan tidak menerima pendapatan

						dari entitas lain.
Laporan Arus Kas	Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar, perubahan kas dan setara kas satu periode akuntansi dengan aktivitas sebagai berikut: - Aktivitas Operasi; - Aktivitas Investasi; - Aktivitas Pendanaan; - Aktivitas Transitoris.	Kas	Laporan Arus Kas disajikan mengenai perubahan kas dan setara kas satu periode akuntansi dengan aktivitas sebagai berikut: - Aktivitas Operasi; - Aktivitas Investasi; - Aktivitas Pendanaan.			Belum sesuai, karena Laporan Arus Kas yang disusun UPTD tidak terdapat aktivitas transitoris yang berasal dari transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), sedangkan UPTD Puskesmas Gunung Pati masih mengelola pendanaannya sendiri tanpa adanya pihak lain.
Laporan Perubahan Ekuitas	Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berikut : - ekuitas awal; - surplus/defisit-LO - koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas; - ekuitas akhir		Laporan Perubahan Ekuitas disajikan dengan pos-pos sebagai berikut: - ekuitas awal; - surplus/defisit-LO - koreksi-koreksi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan/kesalahan mendasar; - ekuitas akhir.			Sudah sesuai, karena Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan ekuitas tahun pelaporan dari tahun sebelumnya dan telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.
Catatan atas Laporan Keuangan	CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dengan informasi terkait dalam CaLk.		CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dengan informasi terkait dalam CaLk.			Sudah sesuai, karena Catatan atas Laporan Keuangan telah menyajikan informasi kebijakan-kebijakan yang digunakan dan rincian-rincian dari setiap laporan keuangan yang disusun dan sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Sumber: Data Sekunder yang Diolah, Tahun 2020

SIMPULAN

Setelah menganalisis data dari laporan keuangan dan keterangan yang diperoleh dari UPTD Puskesmas Gunung Pati, bahwa laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai dan isinya relatif telah menyajikan informasi pelaksanaan

anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Baridwan, Zaki. 2017. *Intermediet Accounting Edisi 8*. Yogyakarta: BPFE- Yogayakarta.

- Erlina dan Omar Sakti Rambe. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Jusup, Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 Edisi 7*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Nur dan Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Republik Indonesia, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Republik Indonesia, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- UPTD Puskesmas Gunung Pati Semarang. 2019. *Profil Kesehatan Tahun 2019*.